

Eksplorasi Praktik Pelaporan Keuangan Daerah: Perspektif Aparatur Terhadap Literasi Akuntansi Dan Sistem Informasi Pemerintahan (Studi Kasus: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar)

Author:

Marja Sinurat¹, Ni Luh Gede Gita Putri Prita Sari²

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, JL. Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor ^{1,2}

Email:

dr.marjasinurat@yahoo.com¹, gitaputri.pritasari@gmail.com²

ABSTRACT

The preparation of regional financial reports using the Regional Government Financial Information System (SIPD), which is simultaneously implemented by all local governments in Indonesia, offers both convenience and challenges for the Denpasar City Government. Challenges arise due to limited understanding of the structure and technical preparation of financial reports, as well as system transitions that may lead to omitted input stages in the reporting process. This study aims to analyze the influence of accounting understanding on the quality of regional financial reports, the influence of SIPD implementation on the quality of these reports, and the combined effect of accounting understanding and SIPD implementation on the quality of regional financial reports in Denpasar City. A quantitative research method was employed, with primary data collected through closed-ended questionnaires distributed to officials, employees, staff, and operators within the BPKAD and 36 regional apparatus units, totaling 127 individuals, from which a sample of 56 respondents was selected using a simple random sampling technique. Data analysis was conducted using SPSS version 27. The results indicate that accounting understanding has a significant influence on the quality of regional financial reports, contributing 28%, while SIPD implementation contributes 54.9% to report quality. Furthermore, when combined, accounting understanding and SIPD implementation have a simultaneous influence, contributing 67.6% to the quality of regional financial reports in Denpasar City. These findings highlight the need for the Denpasar City Government to conduct regular training and evaluations to enhance the accounting competencies of officials, employees, and financial staff, thereby supporting the continuous improvement of the quality of regional financial reports in the future.

Keywords: LKPD Quality, Accounting Understanding, SIPD Application

ABSTRAK

Penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, memberikan kemudahan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Denpasar. Tantangan muncul akibat masih terbatasnya pemahaman terkait struktur dan teknis penyusunan laporan keuangan, serta adanya transisi sistem yang dapat menyebabkan tahapan input terlewat dalam proses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah, serta pengaruh secara simultan antara pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner tertutup yang didistribusikan kepada pejabat, pegawai, staf, dan operator pada BPKAD serta 36 perangkat daerah di Kota Denpasar, dengan jumlah populasi 127 orang dan sampel sebanyak 56 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kontribusi sebesar 28%, sedangkan penerapan SIPD memberikan kontribusi sebesar 54,9% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya, secara simultan, pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar dengan kontribusi sebesar 67,6%. Temuan ini menunjukkan pentingnya bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan pelatihan dan evaluasi secara rutin guna meningkatkan kompetensi akuntansi pejabat, pegawai, dan staf keuangan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah secara berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: Kualitas LKPD, Pemahaman Akuntansi, dan Penerapan SIPD

PENDAHULUAN

Pelaksanaan keuangan daerah merupakan wujud nyata desentralisasi fiskal yang bertujuan memenuhi kebutuhan daerah sekaligus mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya (Rahayu, 2022: 5) yang dijalankan melalui empat asas utama: sentralisasi, di mana kewenangan mutlak berada di pemerintah pusat; desentralisasi, berupa pelimpahan wewenang pusat kepada daerah otonom; dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan kepada perangkat daerah sebagai perpanjangan tangan pusat; dan tugas pembantuan, yakni pendelegasian tugas dari pemerintah daerah kepada tingkat administrasi dibawahnya. Konsep ini menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota) sesuai dengan tugas masing-masing (Ambya, 2020: 93).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kepala daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah berdasarkan kebutuhan lokal, dengan tujuan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari pusat maupun pendapatan asli daerah melalui laporan keuangan daerah. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi pemerintah pusat dalam menentukan besaran transfer dana, dengan mempertimbangkan keandalan dan relevansi anggaran yang digunakan.

Laporan keuangan daerah disusun dengan basis akrual untuk memenuhi dua tujuan utama (Sinurat, 2018: 27) yakni: 1) menyediakan informasi pendukung pengambilan keputusan, dan 2) menunjukkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Secara rinci, laporan tersebut mencakup tujuh

aspek informasi mengenai: a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas daerah; b. perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas daerah; c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. ketaatan realisasi APBD; e. pembiayaan aktivitas dan pemenuhan kebutuhan kas; f. potensi daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan; serta g. kemampuan entitas pelaporan mendanai operasionalnya. Dengan demikian, laporan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja dan perencanaan fiskal berkelanjutan.

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran selama satu periode anggaran. Laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik yakni dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Sinurat, 2018: 119). Tujuan umum laporan keuangan daerah untuk menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, transfer, pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih (SAL), pendapatan-LO, beban, dan arus kas (Sinurat, 2018: 119). Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif normatif agar informasinya dapat mencapai tujuannya. Menurut Sinurat (2018: 119), terdapat empat prasyarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila mampu memengaruhi keputusan pengguna melalui manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sementara itu, informasi yang andal harus bebas dari kesalahan material, disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antarperiode serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.

Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan empat komponen pengukuran kualitas LKPD, meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketaatan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). SAP berperan sebagai pedoman akuntansi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas (Deddi dalam Dadang, 2022: 59), sementara ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mencakup seluruh regulasi yang berlaku, termasuk peraturan daerah (Dadang, 2022: 44). Kecukupan pengungkapan diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi publik (Mardiasmo dalam Dadang, 2004: 37), sedangkan SPI berfungsi sebagai pengendalian internal melalui SOP, pemisahan wewenang, dan pembatasan akses guna mencegah fraud (Wilkinson dalam Indriasari, 2008: 57). Dengan memenuhi prasyarat kualitatif dan komponen pengukuran BPK, laporan keuangan daerah dapat menjadi alat pertanggungjawaban yang kredibel dan bermanfaat bagi stakeholders.

Laporan keuangan yang berkualitas dalam hal ini harus memenuhi karakteristik kualitatif normatif agar informasinya dapat mencapai tujuannya. Terdapat empat prasyarat utama yang harus dipenuhi, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila mampu memengaruhi keputusan pengguna melalui manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sementara itu, informasi yang andal harus bebas dari kesalahan material, disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral (Sinurat, 2018: 119). Selain itu, laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antarperiode serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, BPK menetapkan empat komponen pengukuran kualitas, meliputi kesesuaian dengan SAP, ketaatan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), dan efektivitas SPI. SAP berperan sebagai pedoman akuntansi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas (Deddi dalam Dadang, 2022: 59), sementara ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mencakup seluruh regulasi yang berlaku, termasuk peraturan daerah (Dadang, 2022: 44). Kecukupan pengungkapan diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi publik (Mardiasmo dalam Dadang, 2004: 37), sedangkan SPI berfungsi sebagai pengendalian internal melalui SOP, pemisahan wewenang, dan pembatasan akses guna mencegah fraud (Wilkinson dalam Indriasari, 2008: 57). Dengan memenuhi prasyarat kualitatif dan komponen pengukuran BPK, laporan keuangan daerah dapat menjadi alat pertanggungjawaban yang kredibel dan bermanfaat bagi stakeholders.

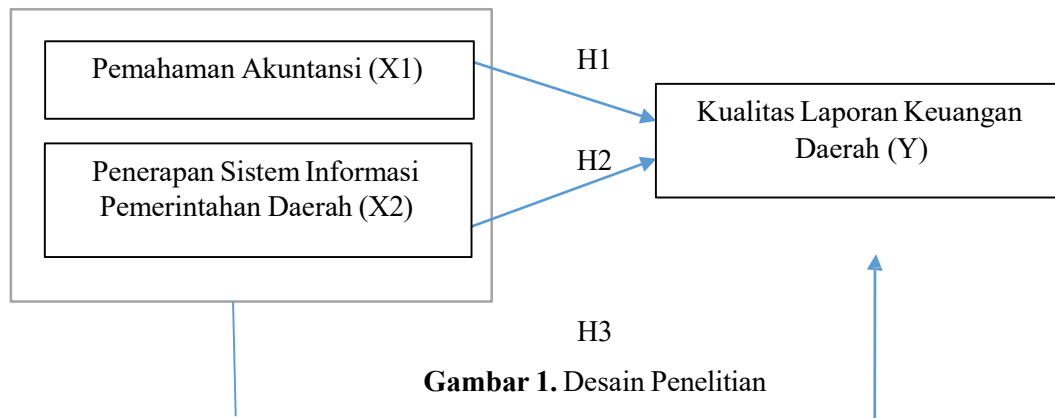
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang terkonsolidasi dan sesuai dengan SAP. Faktanya dalam praktik pemerintahan hingga saat ini masih ditemukan beberapa penyimpangan konsolidasi dan ditemukan sebanyak kurang lebih tiga belas ribu permasalahan terkait LKPP dan LKPD yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023, selanjutnya BPK memberikan opini WTP atas 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta empat opini WDP atas LKKL. Pemeriksaan LKPD di Indonesia oleh BPK dijelaskan bahwa dari 546 LKPD, sebanyak 493 yang baru memperoleh opini WTP, sedangkan sisanya sebanyak 48 yang memperoleh opini WDP, tiga memperoleh opini TMP dan dua dengan opini TW. Pemerintah terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penerapan SIPD dapat diukur berdasarkan variabel penerapan sistem informasi berbasis teknologi yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan, serta relevansi (April, 2023: 431).

Kota Denpasar menjadi salah satu daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP dalam penyusunan LKPD selama bertahun-tahun. Namun, adaptasi terhadap SIPD di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih menghadapi tantangan, termasuk dalam hal

pemahaman akuntansi pegawai serta keterbatasan fitur dalam sistem SIPD yang masih mengalami perbaikan. Hingga tahun 2024, penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar telah dilakukan secara penuh sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, masih ditemukan kendala seperti sistem yang sering mengalami gangguan, fitur yang belum optimal, serta kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan aplikasi. Sebagian besar proses masih bergantung pada operator khusus, sementara pegawai lain memerlukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SIPD. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam pemahaman akuntansi yang berpengaruh pada efektivitas penggunaan SIPD dalam menyusun pelaporan keuangan. Maka dari itu, urgensi pemahaman pada tingkat berpikir (C2) menurut Taksonomi Bloom dapat diterapkan untuk menganalisis tingkat pemahaman akuntansi para pelaku penyusun laporan keuangan di lingkungan BPKAD Kota Denpasar. Pemahaman dasar terhadap tahapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada penyusunan daerah yang terdiri atas: LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LaK, LPE, dan CaLK (Sinurat, 2018: 126). Asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa pemahaman dasar mengenai akuntansi yang baik akan mendukung optimalisasi SIPD dalam penyusunan LKPD, sehingga kualitas laporan keuangan dapat lebih terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman akuntansi dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Denpasar sehingga nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah melalui metode kuantitatif antara kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi bagi Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi terbaru bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan perolehan data melalui kuesioner. Peneliti menggunakan populasi sebanyak 127 orang yang terdiri dari 91 pejabat, pegawai, staf serta operator yang ada di BPKAD dan 36 perangkat daerah di Kota Denpasar dengan metode *simple random sampling* sehingga diperoleh sebanyak 56 sampel dalam penelitian ini. Instrumen penelitian berupa indikator pemahaman akuntansi yang terdiri dari neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan (Sinurat, 2018: 126), penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terdiri dari portabilitas, akurasi, konsisten, responsivitas terhadap pengguna, frekuensi pengguna, kemudahan akses, dan efektivitas kerja (DeLone dan McLean (2003) dalam Jogiyanto, 2007: 120) serta indikator kualitas laporan keuangan daerah yang terdiri dari memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkap, penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas, konsistensi, dan kesesuaian konteks. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dituangkan dalam desain penelitian pada Gambar 1.



Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan gambar di atas, masalah dan hipotesis yang diajukan menggunakan pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah sebagai variabel bebas dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel terikat. Sumber data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui pengisian *google form* yang berisi pernyataan dan pertanyaan di mana jawaban responden diukur dengan skala *likert*. Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yaitu berupa hasil kuesioner sehingga dapat diketahui apakah jawaban responden telah dijawab dengan benar atau tidak. Keberhasilan pada uji instrumen penelitian selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, untuk menjawab hipotesis dilakukan pengujian terhadap model regresi. Analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik analisis dalam menjawab hipotesis pertama dan kedua dengan persamaan sebagai berikut.

$$\hat{Y} = a + bX + e$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = Kualitas Laporan Keuangan Daerah (variabel dependen)

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = Pemahaman Akuntansi/ Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan

e = *error term*

Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis dalam menjawab hipotesis ketiga dengan persamaan sebagai berikut.

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = Kualitas Laporan Keuangan Daerah (variabel dependen)

a = konstanta

b1, b2, b3 = koefisien regresi

X1 = Pemahaman Akuntansi (variabel independen 1)

X2 = Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (variabel independen 2)

e = *error term*

Persamaan regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh konstanta (a) dan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen (b1, b2, b3), serta error term (e) yang merepresentasikan variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Koefisien regresi (b1, b2, b3) mengindikasikan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis pertama (H1) diterima, yang berarti bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan hasil uji regresi linear pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai $R = 0,529$ dengan signifikansi $< 0,05$, nilai $R^2 = 0,280$ dengan persamaan $\hat{Y} = 54,829 + 0,319X_1$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 memberikan pengaruh terhadap peningkatan skor pemahaman akuntansi sebesar 0,319. Hubungan yang ditunjukkan adalah positif yang artinya semakin baik pemahaman akuntansi pegawai, semakin tinggi kualitas laporan keuangan daerah. Persamaan ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berkontribusi nyata terhadap kualitas LKPD, meskipun hanya 28% (R^2), dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t-hit	Signifikansi	R	R^2	Persamaan Regresi
1	Pemahaman Akuntansi (X_1)	0.319	4.580	<0.001	0.529	0.280	$\hat{Y} = 54.829 + 0.319X_1$

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2025)

Bukti ini juga mengindikasikan bahwa pemahaman yang dimiliki OPD di Kota Denpasar mengenai komponen laporan keuangan daerah saat ini cukup memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan. Namun, perlu ada peningkatan kompetensi dan pelatihan akuntansi bagi pejabat OPD agar kualitas laporan keuangan daerah terus terjaga dan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi perolehan opini BPK yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat serta peluang pemerintah daerah untuk mendapatkan dana tambahan atau insentif dari pemerintah pusat. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai akuntansi, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 2, hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa nilai $R = 0,741$ dengan signifikansi $< 0,05$, nilai $R^2 = 0,549$ dengan persamaan $\hat{Y} = 29,540 + 0,872X_2$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_2 memberikan pengaruh terhadap peningkatan skor penerapan sistem informasi pemerintahan daerah sebesar 0,872. yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan kontribusi sebesar 54,9%. Hubungan yang ditunjukkan adalah positif yang artinya semakin baik penerapan system informasi pemerintahan daerah, semakin tinggi kualitas laporan keuangan daerah. Persamaan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kualitas LKPD, dengan kontribusi sebesar 54,9%(R^2), dapat dilihat pada table 2 berikut.

Tabel 2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t-hit	Signifikansi	R	R ²	Persamaan Regresi
1	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X ₂)	0.872	8.101	<0.001	0.741	0.549	$\hat{Y} = 29,540 + 0,872X_2$

Sumber: Data Primer diolah oleh peneliti (2025).

Nilai t-hit yang lebih besar dibandingkan dengan pemahaman akuntansi menunjukan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, terutama dalam konsolidasi laporan keuangan daerah dengan pusat. Hal ini memastikan bahwa semua laporan keuangan daerah memenuhi regulasi pemerintah dan standar akuntansi yang berlaku, meskipun pemahaman akuntansi juga berpengaruh. Tanpa sistem informasi yang optimal, pegawai masih dapat mengalami kesalahan dalam menerapkan regulasi terbaru.

Pengaruh simultan dari X_1 (pemahaman akuntansi) dan X_2 (penerapan sistem informasi pemerintahan daerah) terhadap Y menunjukkan sinergi statistik yang signifikan, meski masing-masing variabel diukur secara terpisah tanpa membentuk satu konstruk gabungan. Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada Tabel 3, hasil uji regresi linear menunjukkan nilai $R = 0,741$ dengan signifikansi $< 0,05$, nilai $R^2 = 0,549$ dengan persamaan $\hat{Y} = 15,094 + 0,222X_1 + 0,765X_2$. Hasil uji F pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel X_1 dan X_2 memberikan pengaruh terhadap peningkatan skor pemahaman akuntansi sebesar 0,222 dan peningkatan skor penerapan sistem informasi pemerintahan daerah sebesar 0,765. Hubungan yang ditunjukkan adalah positif yang artinya semakin

baik pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah secara bersama-sama, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Pengaruh Simultan Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t-hit	Signifikansi	R	R ²	Persamaan Regresi
1	Pemahaman Akuntansi (X1)	0.222	3.568	<0.001	0.529	0.280	$\hat{Y}=15.094+0.222X_1 + 0.765X_2$
2	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X2)	0.765	8.101	<0.001	0.741	0.549	$\hat{Y}=15.094+0.222X_1 + 0.765X_2$

Sumber: Data Primer diolah oleh peneliti (2025)

Bukti empiris tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman akuntansi dan semakin optimal penerapan sistem informasi pemerintahan daerah, semakin kuat dampaknya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan pada OPD di Kota Denpasar memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut bekerja secara simultan untuk meningkatkan aspek relevansi, keandalan, komparabilitas, dan keterpahaman laporan keuangan daerah.

Hasil ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang penyusunan laporan keuangan, termasuk komponen seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan, memainkan peran penting. Peningkatan pemahaman akuntansi dan optimalisasi penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Denpasar tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tetapi juga memastikan bahwa prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat diterapkan secara maksimal. Dengan kombinasi keduanya, pemerintah daerah Kota Denpasar dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola keuangan yang berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah di Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $r = 0,529$ dan nilai $r^2 = 0,280$ memiliki kontribusi sebesar 28% dengan persamaan $\hat{Y} = 54,829 + 0,319X_1$. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $r = 0,741$ dan nilai $r^2 = 0,549$ memiliki kontribusi sebesar 54,9% dengan persamaan $\hat{Y} = 15,094 + 0,222X_1 + 0,765X_2$.

Pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $R = 0,822$ dan nilai $R^2 = 0,676$ memiliki kontribusi sebesar 67,6% dengan persamaan $\hat{Y} = 15,094 + 0,222X_1 + 0,765X_2$.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: deepublish.
- Ambya. 2020. *Ekonomi Keuangan Daerah*. Aura CV.
- Anugrah Utama Raharja. Basuki. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Dadang. 2022. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP dari BPK*. CV Cendekia Press.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khusnaini, M. 2018. *Keuangan Daerah*. UBPress.
- La, Ode. 2020. *Akuntansi Keuangan Daerah*. AA-DZ Grafika. Kendari.
- Musi. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group.
- Purnawati, Sistem, Implementasi. 2024. *Sistem Informasi Teori dan Implementasi Sistem Informasi di berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sadu. 2013. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan Pemda*. IPDN Press.
- Sari, Dhina Mustika, dan Triana Fitriastuti. 2017. *Dasar Akuntansi Pemahaman Konsep dan Praktek*. Mulawarman University Press.
- Sinurat. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Galia Indonesia. Bogor.
- Sinurat, Royadi, & Simanjuntak, T. H. 2020. *Cara Cerdas dan Mahir: 465 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Yulia, Siska, dan Negeri. 2016. *Proceeding, National Conference of Applied Sciences, Engineering Business and Information Technology*. 15–16. Politeknik Negeri Padang Press.

Jurnal

- Empiris, Studi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah, Kabupaten Ponorogo, Program Studi Strata, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Oleh. 2020.
- Fitriasari, Dina. 2024. "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)." 11(2):34–54.
- Hendra, Asep. 2023. "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

- Hunairah, Andi, dan Rezkiaty Syamsu. 2024. "SEIKO: Journal of Management & Business Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba." 7(2):464–78.
- Muhasaba, E. L., dan Jurnal Akuntansi. 2021. "Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Indonesia: Literature Review." 12(2):157–71.
- Nur, Mawar Maulana, Ana Sopanah, dan Endah Puspitasari. 2023. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan." 10(1):48–58.
- Paat, Florencia Fiona. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi." 4(1):1–8.
- Puspitawati, Lilis. 2020. "Fit Model Test Kualitas Informasi Akuntansi yang dipengaruhi oleh kualitas teknologi keuangan daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandun)." 12(2):25–37.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. "PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD."
- SIPD, Pusat. 2024. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD): Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah." 44–46.
- Sri, Dian, dan Menara. 2022. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi." VIII(1):181–97.
- Sri Rahayu, Ani. 2022. "Pemerintah Daerah.pdf." 5.
- Roya, Program, Magister Akuntansi, dan Universitas Sam Ratulangi. 2023. "Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing 'Goodwill', 1 4 (1), 2023." 4(71):37–52.
- Triana, Sari. 2021. "Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis." 9(2):103–12.
- Tulasi, Dominikus, dan Jurusan Marketing Communication. n.d. "Menurut Pemahaman Taksonomi Bloom: Penemuan Awal Taksonomi." (9):359–71.
- Yayah pudin dalam Hasanah. 2017. "Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis." 7–19.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta. 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta. 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi

- Pemerintahan Berbasis Akrua. Jakarta. 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta. 2020.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. 2023.
- Febrianto, fajar. “BPK Temukan 13 Ribuan Masalah di Laporan Keuangan Pemerintah, Nilainya Rp 8,97T”. Diakses pada 29 November 2024.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 29 November 2024.
- Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 2024. Diakses pada 29 November 2024.
- Warta Pemeriksa. “Serahkan IHPS I 2024, BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp.13,66 Triliun”. Diakses pada 02 Desember 2024.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar. “Pelatihan SIPD Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan”. Diakses pada 10 Desember 2024.
- Agustia, Y. P., and Suryani, E. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014-2016). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 63–74.
- Al-Duais, S. D., Malek, M., Abdul Hamid, M. A., and Almasawa, A. M. (2022). Ownership structure and real earnings management: Evidence from an emerging market. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(2), 380–404
- Al-Jaifi, H. A. (2017). Ownership concentration, earnings management and stock market liquidity: Evidence from Malaysia. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(3), 490–510.
- Chen, X., Cheng, Q., and Wang, X. (2015). Does increased board independence reduce earnings management? Evidence from recent regulatory reforms. *Review of Accounting Studies*, 20(2), 899–933.